

## **BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan setiap peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Melihat dari penelirian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

#### **1. Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor.**

Penelitian ini dilakukan oleh Umeidini, Nuriah, dan Fedryansah pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, sejauhmana masyarakat peduli terhadap bencana yang menimpa mereka setiap musim penghujan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan interpretasi dari data primer maupun sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat bentuk partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan bencana di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor. Bentuk dari partisipasi masyarakat tersebut berupa

partisipasi pemikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi barang dan partisipasi uang. Kelima bentuk partisipasi tersebut sudah diterapkan dan berjalan dengan baik di dalam masyarakat ketika bencana banjir akan datang.

## **2. Problematika Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Menggunakan Metode Partisipatif Masyarakat.**

Penelitian ini dilakukan oleh Modifa, Siregar, dan Sinaga pada tahun 2020. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari pedoman metode pembangunan partisipatif masyarakat pascabencana yang paling efektif dan berkeadilan bagi masyarakat yang terkena bencana melalui studi kasus proyek Aceh Nias *Settlement Support Program* (ANSSP) 2005-2007. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga untuk memperoleh data menggunakan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi pustaka yaitu studi dokumentasi meliputi referensi yang relevan dengan penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan data-data dari website. Kemudian untuk penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, diskusi-diskusi forum dan survey lapangan terkait implementasi proyek secara langsung.

Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa pembangunan berbasis partisipatif masyarakat khususnya penanganan pascabencana telah membuktikan hasil yang baik. Dari penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap korban bencana juga menyatakan, bahwa proses partisipatif masyarakat memungkinkan modal sosial dan kemampuan pengambilan keputusan dalam masyarakat dimaksimalkan. Selain itu, dari hasil studi literatur, wawancara, dan

buku laporan ANSSP 2007 yang dipublish oleh UN-Habitat, juga menggambarkan bahwa model pembangunan partisipatif tersebut mampu menjawab semua faktor-faktor negatif.

### **3. Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Bencana Di Kota Surakarta.**

Penelitian ini dilakukan oleh Pramono, dan Suranto yang dipublish pada tahun 2021. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam penanggulangan bencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan analisis data interaktif. Sumber data dari penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi yang dijadikan fokus pada penelitian ini adalah Kota Surakarta, karena Kota Surakarta ini adalah salah satu daerah dengan potensi rawan bencana, seperti bencana banjir.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana terlihat jelas pada tahap tanggap darurat bencana. Masyarakat dalam hal ini secara bersama-sama melakukan penyelamatan, evakuasi dan penyediaan posko darurat atau evakuasi. Selain itu, masyarakat juga bergotong royong dalam hal menyediakan segala kebutuhan warga yang terdampak bencana. Namun dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap prabencana dan pascabencana masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya sanksi yang

tegas, serta tidak adanya wadah bagi masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan bencana.

Matriks 2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti   | Judul Penelitian dan Metode  | Hasil Penelitian   | Perbedaan dengan Penelitian yang Dilakukan Peneliti  |
|----|---|--|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  |
| 1. | Femil Umeidini, Eva Nuriah, dan Muhammad Fedryansyah. | Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif. | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat bentuk partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan bencana di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor. Bentuk dari partisipasi masyarakat tersebut berupa partisipasi pemikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi barang dan partisipasi uang. Kelima bentuk partisipasi tersebut sudah diterapkan dan berjalan dengan baik di dalam masyarakat ketika bencana banjir akan datang. | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi, serta pada variabel bebasnya. Pada penelitian ini variabel bebasnya adalah penanggulangan bencana, sedangkan variabel bebas pada penelitian yang akan diteliti adalah proses rehabilitasi pascabencana. |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 2. | Ira Modifa, Robert Tua Siregar, dan Rudi Salam Sinaga. | <p>Problematika Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Menggunakan Metode Partisipatif Masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode Studi Kasus.</p> | <p>Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa pembangunan berbasis partisipatif masyarakat khususnya penanganan pascabencana telah membuktikan hasil yang baik. Dari penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap korban bencana juga menyatakan, bahwa proses partisipatif masyarakat memungkinkan modal sosial dan kemampuan pengambilan keputusan dalam masyarakat dimaksimalkan. Selain itu, dari hasil studi literatur, wawancara, dan buku laporan ANSSP 2007 yang dipublish oleh UN-Habitat, juga menggambarkan bahwa model pembangunan partisipatif tersebut mampu menjawab semua faktor-faktor negatif.</p> | <p>Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini terletak pada lokasi, metode penelitian, serta pada variabel terikatnya. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode studi kasus dan variabel terikat yang diteliti adalah problematika, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif dan variabel terikatnya terfokus untuk meneliti partisipasi masyarakat.</p> |
|----|--|--|--|--|

|    |                                |  |   |  |
|----|--------------------------------|--|---|--|
| 3. | Joko Pramono dan Joko Suranto. | Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Bencana Di Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif. | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana terlihat jelas pada tahap tanggap darurat bencana. Masyarakat dalam hal ini secara bersama-sama melakukan penyelamatan, evakuasi dan penyediaan posko darurat atau evakuasi. Selain itu, masyarakat juga bergotong royong dalam hal menyediakan segala kebutuhan warga yang terdampak bencana. Namun dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap prabencana dan pascabencana masih belum optimal. | Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi dan pada variabel bebasnya. Variabel bebas pada penelitian ini adalah manajemen bencana, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan variabel bebasnya adalah proses rehabilitasi pascabencana. |
|----|--------------------------------|--|---|--|

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi, metode, dan variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu tersebut kebanyakan lebih menyeluruh pada seluruh tahap manajemen bencana, sedangkan variabel yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini lebih terfokus pada tahap rehabilitasi pascabencana.

Perbedaan tersebut juga terlihat pada metode yang digunakan, beberapa dari penelitian terdahulu menggunakan metode studi kasus, sedangkan peneliti pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain itu, perbedaan tersebut juga terletak pada lokasi fokus yang dipilih oleh peneliti. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah lokasi yang baru dan belum pernah ada penelitian yang dilakukan di lokasi tersebut.

## **2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

### **2.2.1 Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat**

#### **2.2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Pengertian partisipasi sering dikenal atau sering dikaitkan dengan istilah peran serta. Seorang ahli bernama Davis mengemukakan definisi partisipasi yang dikutip oleh Santoso (1988:13) sebagai berikut:

“Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.”

Menurut ahli lain bernama Andriani (2018) partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Kemudian di dalam kasus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar tanggung jawab atau pekerjaannya sendiri (Theresia *et all* 2015:196).

Moeliono (2004) juga turut menjelaskan bahwa:

“Partisipasi adalah bentuk keterlibatan serta keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya

(*intrinsik*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.”

Sedangkan partisipasi masyarakat sendiri cenderung menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Astuti (2011:34) memberikan penegasan bahwa:

“Partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan warga masyarakat.”

Berdasarkan beberapa uraian pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan masyarakat secara sukarela dan tanpa paksaan apapun dalam usaha mencapai suatu tujuan yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Keterlibatan dengan sukarela dalam hal ini terkait dengan keikutsertaan dalam proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi yang berlangsung.

#### **2.2.1.2 Aspek-Aspek Partisipasi Masyarakat**

Pasaribu dan Simanjuntak (dalam Fahrudin, 2011:39-40) menyebutkan aspek-aspek partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Partisipasi buah pikiran, yaitu partisipasi yang diberikan dalam pertemuan atau rapat dan berupa pendapat atau ide.
2. Partisipasi tenaga, yaitu partisipasi yang diberikan dalam berbagai kegiatan dalam rangka perbaikan atau pembangunan desa, sebagai bentuk pertolongan bagi orang lain, dan lain sebagainya.
3. Partisipasi harta benda, adalah partisipasi yang diberikan oleh seseorang dalam berbagai kegiatan seperti perbaikan atau pembangunan desa, sebagai bentuk pertolongan kepada orang lain, dan lain sebagainya.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, adalah partisipasi yang diberikan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendorong berbagai macam bentuk usaha dan industri.
5. Partisipasi sosial, yaitu partisipasi yang diberikan seseorang sebagai tanda keguyuban seperti kegiatan koperasi, arisan, melayat, kondangan, dan lain sebagainya.



Partisipasi masyarakat juga terefleksikan dalam berbagai bentuk, Rusidi dalam Siregar (2001:21) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi:

1. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
2. Sumbangan materi (dana, barang dan alat)
3. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja)
4. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Sementara itu, Cohen dan Uphoff dalam Ndraha (1990:104) juga menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*)
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*)
4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Thibany dalam Purnamasari (2006:23) turut menjelaskan bahwa partisipasi penuh dapat terwujud apabila struktur kelembagaan di dalamnya memungkinkan untuk warga dapat berpartisipasi dan memutuskan persoalan sehari-hari yang dialami oleh mereka sendiri serta representasi masyarakat yang terwakili secara proporsional di dalam setiap proses pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus didasarkan pada (1) pembuatan keputusan, (2) penerapan keputusan, (3) menikmati hasil, dan (4) evaluasi hasil. Sementara itu, terdapat empat aspek yang turut menjadi indikasi terbangunnya partisipasi, yaitu:

1. Informasi atau akses lainnya;
2. Inisiatif (*voice/suara*) dan apresiasi warga (masukan);
3. Mekanisme pengambilan keputusan;
4. Kontrol pengawasan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, peneliti memilih untuk meneliti menggunakan aspek partisipasi menurut Pasaribu dan Simanjuntak (dalam Fahrudin, 2011:39-40) yang menyebutkan terdapat 5 (lima) bentuk partisipasi di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan aspek tersebut yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah terdampak bencana gempa bumi, serta sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### **2.2.1.3 Kelebihan dan Kekurangan Partisipasi Masyarakat**

Suratno (dalam Fahrudin, 2011:41-42) menjelaskan manfaat dari partisipasi yang akan dirasakan oleh masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan di daerahnya, sehingga masyarakat dapat mengetahui dampak yang akan terjadi serta cara menanggulangnya.
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait masalah lingkungan, pembangunan dan hubungannya, sehingga pemerintah juga dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Masyarakat dapat menyampaikan informasi serta pendapatnya kepada pemerintah terutama masyarakat yang lingkungannya terkena dampak proyek.
4. Pemerintah bisa mendapatkan informasi-informasi terlebih dahulu dan lebih lengkap dari masyarakat sehingga dapat menentukan langkah atau keputusan secara tepat.
5. Meminimalisir terjadinya salah paham dan konflik karena dari pihak masyarakat maupun pemerintah sudah saling memahami maksud satu sama lain.
6. Masyarakat dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat positif serta menghindari diri dari dampak negatif.
7. Meningkatnya perhatian dari pemerintah atau pemrakarsa proyek pada masyarakat.

Selain beberapa manfaat di atas sebagai kelebihan dari partisipasi masyarakat, terdapat juga beberapa kerugian yang sering terjadi menurut Canter (1997) dalam Suratmo (1992) adalah:

1. Informasi dari masyarakat bermacam-macam bentuknya dan seringnya tidak dapat ditunjang oleh penjelasan ilmiah, sehingga terkadang pengambilan

keputusan menjadi makin sulit atau justru mengacaukan keputusan yang telah diambil.

2. Informasi dan pendapat yang diberikan berasal dari anggota-anggota yang tidak banyak tahu atau kurang memahami mengenai proyek pembangunan, dampak, dan pengelolaan lingkungan.
3. Berkurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan dengar pendapat yang diadakan karena terkadang penjelasannya terlalu sulit dipahami oleh masyarakat, sehingga usaha untuk mendapatkan berbagai pendapat masyarakat sedikit kurang berhasil.
4. Penyimpulan pendapat masyarakat oleh instansi masyarakat seringkali tidak berdasarkan oleh suara terbanyak (mayoritas) melainkan berdasarkan informasi yang logis dan dapat diterima secara ilmiah oleh pemerintah.
5. Sering terdapat kelompok yang tidak puas akan keputusan yang diambil karena terdapat perbedaan pendapat diantara kelompok-kelompok masyarakat tersebut.
6. Dimanipulasikan untuk kepentingan pribadi maupun suatu kelompok tertentu dengan niat yang tidak baik.

#### **2.2.1.4 Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat**

Menurut Sahidu (1998) dalam Fahrudin (2011:44), terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, yaitu antara lain:

“Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif harapan, *needs*, *rewards*, dan penguasaan informasi. Kemudian faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana, dan prasarana. Sedangkan untuk faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal, dan pengalaman yang dimiliki.”

Slamet (1994) dalam Fahrudin (2011:43) juga menjelaskan faktor-faktor yang mendukung terwujudnya secara nyata partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu:

1. Adanya kesempatan, yaitu suasana atau kondisi yang disadari dapat menjadi peluang untuk berpartisipasi.
2. Adanya kemauan, yaitu adanya dorongan atau minat dan motivasi untuk berpartisipasi, misalnya karena mengetahui manfaat dari partisipasi tersebut.
3. Adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, dapat berupa ide pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya.

## **2.2.2 Tinjauan tentang Rehabilitasi Pascabencana**

### **2.2.2.1 Pengertian Rehabilitasi Pascabencana**

Rehabilitasi dilihat dari Bahasa Inggris yaitu *rehabilitation* yang berarti mengembalikan seperti semula, dalam hal ini berkaitan dengan mengembalikan kapasitas atau kondisi yang pernah dimiliki dan hilang karena akibat dari musibah. Kapasitas atau kondisi inilah yang akan dikembalikan seperti semula yaitu seperti kondisi sebelum terjadi musibah atau bencana tersebut. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga menjelaskan bahwa:

“Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.”

Pascabencana sendiri sering disebut dengan istilah pemulihan (*recovery*), yaitu kegiatan mengembalikan sistem infrastruktur kepada standar operasi minimal dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk mengembalikan kehidupan ke keadaan dan kondisi normal atau seperti semula dan bahkan dapat menjadi lebih baik setelah bencana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi pascabencana adalah upaya pemulihan suatu kondisi menjadi seperti semula yang dilakukan setelah bencana tersebut terjadi dan langkah yang diambil tergantung pada akibat yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.

### **2.2.2.2 Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana**

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 11 tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat proses rehabilitasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
4. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
5. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
6. Pemulihan sosial psikologis;
7. Pelayanan kesehatan;
8. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
9. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
10. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
11. Pemulihan fungsi pemerintahan;
12. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

### **2.2.3 Tinjauan tentang Gempa Bumi**

#### **2.2.3.1 Pengertian Gempa Bumi**

Gempa bumi adalah getaran asli dari dalam bumi, bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi yang pecah dan bergeser dengan keras. Gempa bumi juga dapat diartikan sebagai bencana alam yang datangnya secara tiba-tiba dan dalam waktu yang relatif singkat namun dampaknya dapat menghancurkan semua yang ada di muka bumi ini baik harta, benda, maupun manusia. Lutgens (1982) menyebutkan bahwa gempa bumi adalah getaran bumi yang dihasilkan oleh percepatan energi yang dilepaskan, energi ini menyebar ke segala arah dari pusat sumbernya.

Gempa bumi dapat terjadi diakibatkan oleh beberapa hal, seperti dinamika bumi (tektonik), aktivitas gunung api, akibat meteor jatuh, longsoran (di bawah muka air laut), dan ledakan bom nuklir di bawah permukaan. Gempa bumi tektonik merupakan gempa bumi yang paling umum dan sering terjadi, karena gempa ini merupakan getaran yang dihasilkan dari peristiwa pematahan batuan akibat

benturan dua lempeng secara perlahan-lahan sehingga energi yang terkumpul melampaui batas kekuatan batuan.

### **2.2.3.2 Karakteristik Gempa Bumi**

Gempa bumi memiliki karakteristik yang khas yang perlu diketahui untuk menjadi antisipasi ketika mengalami musibah bencana gempa bumi, yaitu:

1. Tidak dapat dicegah.
2. Peristiwanya sangat mendadak dan mengejutkan.
3. Waktu terjadinya, lokasi pusatnya dan kekuatannya tidak dapat diprediksi (diperkirakan) secara tepat atau akurat oleh siapapun, termasuk pakar-pakar gempa.

### **2.2.4 Tinjauan tentang Kebijakan Rehabilitasi Pascabencana di Kabupaten Cianjur**

Bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur menimbulkan banyak sekali dampak bagi warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Beberapa dari dampak tersebut diantaranya seperti kerusakan-kerusakan pada rumah-rumah dan juga fasilitas umum yang ada di wilayah terdampak. Berdasarkan beberapa dampak yang dialami oleh warga masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan beberapa kebijakan terkait upaya rehabilitasi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Cianjur menyiapkan 200 hunian tetap berupa rumah instan sederhana, sehat dan struktur tahan gempa. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep S. Alamsyah pada konferensi pers Update Penanganan Gempa Bumi Cianjur. Cecep menyampaikan bahwa

untuk warga yang rumahnya rusak berat tidak ditempatkan di hunian sementara, tetapi langsung dibangun hunian tetap dan mendapatkan dana tunggu hunian sebesar 500 ribu per Kepala Keluarga (KK).

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada fasilitas sosial dan fasilitas umum di Kabupaten Cianjur, diantaranya seperti sekolah, masjid, rumah sakit, dan puskesmas. Beberapa fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut lebih didahulukan karena tidak ingin kegiatan masyarakat dan layanan publik terganggu lama. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra s. Atmawidjaja sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR.
3. Pemerintah Desa Bangbayang saat ini sudah mulai melakukan pencairan dana bantuan untuk rumah rusak namun masih dilakukan secara bertahap dan harus ada bukti pertanggung jawaban dari setiap pencairan dana.

#### **2.2.5 Relevansi Partisipasi Masyarakat dengan Pekerja Sosial dalam Bidang Kebencanaan**

Pekerjaan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Zastrow (2004) dalam buku *Introduction to Social Work and Social Welfare*, adalah sebagai profesi terdepan dalam pemberian pelayanan sosial untuk membantu orang, baik secara individual, kelompok, keluarga, maupun masyarakat, dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seseorang baik secara individu maupun di dalam masyarakat tentunya selalu menemui beberapa hambatan dan rintangan, pekerja sosial sebagai salah satu komponen

Sumber Daya Kesejahteraan Sosial hadir sebagai profesi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat tentunya tidak hanya berkaitan dengan persoalan sehari-hari, tetapi juga dapat terjadi akibat isu kebencanaan. Salah satu permasalahan yang kerap kali terjadi adalah ketidak pekaan masyarakat terhadap kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, dan potensi kebencanaan yang mengintai.

Pekerja sosial dalam bidang kebencanaan dan pengungsi memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat. Pekerjaan Sosial dengan Bencana sendiri memiliki pengertian seperti yang dijelaskan dalam Tukino dkk (2006:43) sebagai berikut:

Pekerjaan sosial dengan korban bencana dan pengungsi merupakan suatu bentuk praktek pekerjaan sosial yang dilaksanakan untuk membantu dan meringankan penderitaan ekstra besar yang dihadapi oleh masyarakat sebagai korban bencana maupun pengungsian. Hilangnya nyawa, hilangnya harta benda yang dikumpulkan sepanjang tahun kehidupannya, hancurnya infrastruktur, serta penderitaan lahir batin yang dialami oleh pengungsi itu sendiri merupakan sedikit permasalahan yang dapat disebutkan disini.

Berdasarkan pengertian tersebut, pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi dapat berperan dalam memberikan pelayanan serta bantuan baik secara fisik maupun non fisik untuk mengembalikan keberfungsian sosial korban bencana pada keseharian mereka, seperti membantu memulihkan trauma pascabencana terjadi serta dampak lain yang ditimbulkan pascabencana. Beberapa peran pekerja sosial yang lainnya khususnya pada proses rehabilitasi pascabencana adalah seperti sebagai fasilitator, dan sebagai perantara (*broker*).

Peran pekerja sosial yang pertama adalah sebagai fasilitator, pekerja sosial dalam hal ini berperan dalam memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh

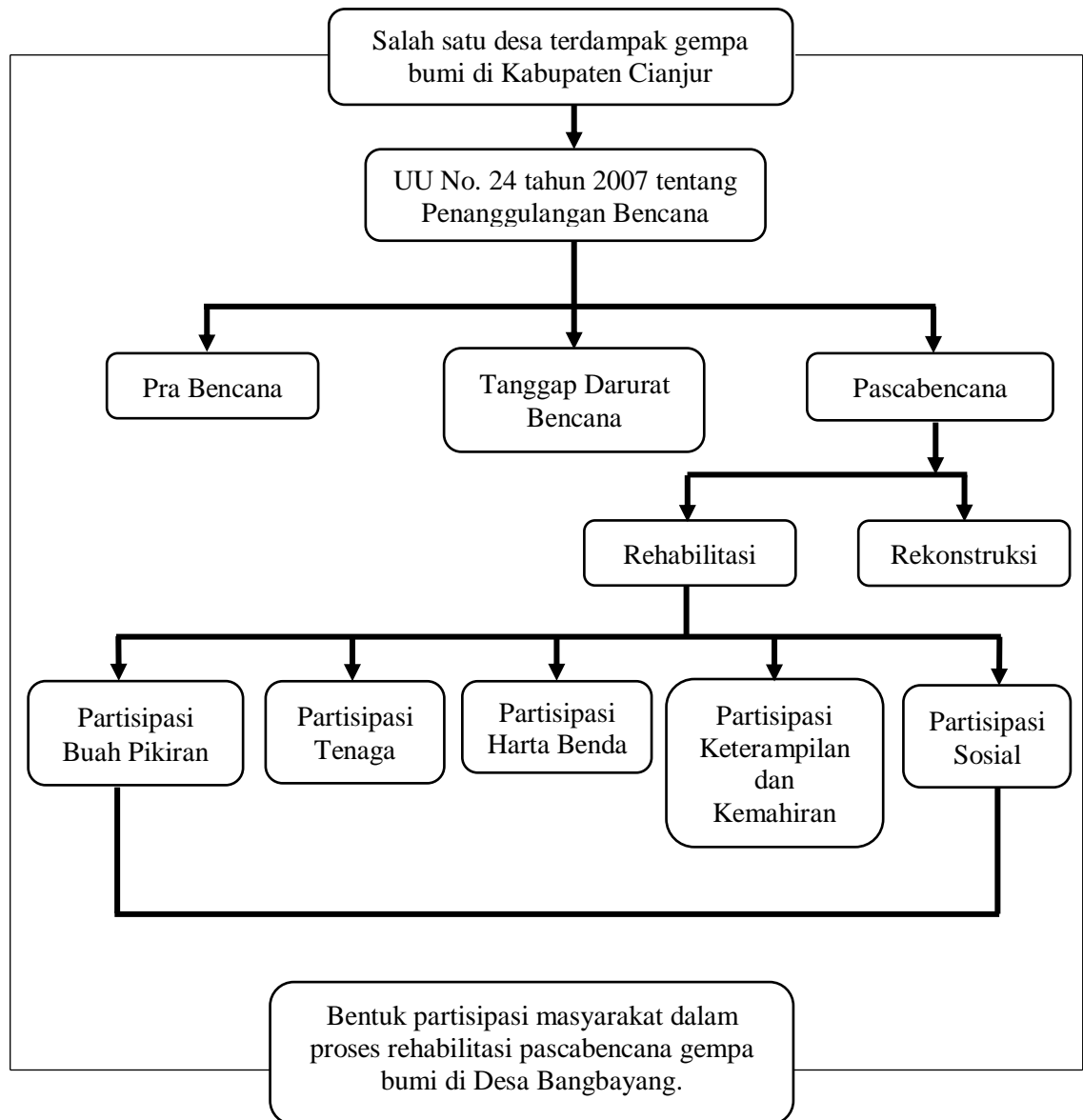


pelayanan dari pihak-pihak penyelenggara penanggulangan bencana, dalam proses rehabilitasi pascabencana ini pekerja sosial membantu memfasilitasi dalam bentuk kegiatan yang menjadi upaya perbaikan dan pemulihan lingkungan pascabencana. Peran pekerja sosial yang kedua yaitu sebagai perantara (*broker*), dalam hal ini pekerja sosial menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak-pihak yang menjadi sistem sumber dan yang dibutuhkan dalam proses rehabilitasi pascabencana, pihak-pihak tersebut seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan beberapa ahli terkait proses rehabilitasi pascabencana.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Bagan di bawah ini merupakan kerangka pemikiran yang berisi gambaran besar dari penelitian yang dilakukan terkait partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi di Desa Bangbayang. Gambaran besar penelitian ini bermula dari adanya kejadian gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur dengan salah satu desa yang terdampak yaitu Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat 3 tahapan penanggulangan bencana, yaitu pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana, dan pascabencana, dari ketiga tahapan tersebut, penelitian ini lebih berfokus pada tahap pascabencana khususnya pada proses rehabilitasi. Penelitian yang dilakukan pada proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi ini meneliti terkait bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat terutama partisipasi dalam bentuk buah pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan kemahiran, serta bagaimana partisipasi dalam bentuk sosial. Hasil dari kelima

bentuk partisipasi tersebut yang nantinya dapat menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi di Desa Bangbayang. Berikut adalah bentuk bagan dari kerangka pemikiran di atas.



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran